

SENATOR



ISSN 2978 - 3118

ISSN 2987-3118



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : 16-30 NOVEMBER 2024

■ Nasional

**Bea Masuk Produk Pangan
Harus Diperketat**

■ Gagasan

**Food Estate Merauke:
Harapan dan Tantangan Menuju
Kemandirian Pangan di Era Prabowo**

■ Varia Senat

**BKN Diminta Jaga
Kejujuran Dalam
Seleksi PPPK**

■ Sekretariat Jenderal

**DWP Setjen DPD RI Gelar
Seminar Pengelolaan
Keuangan**

■ Wisata

**Empat Destinasi Menarik
Di Pulau Batam**

*Four interesting destinations
in Batam Island*



Senator Dukung Penghapusan Utang Petani dan Nelayan

**Lembaga Parlemen
Rohnya Demokrasi**

SCAN
ME!

Akses
MAJALAH SENATOR
Versi Digital



Dari Daerah Untuk Indonesia



SENAT UTAMA

04



- Senator Dukung Penghapusan Utang Petani dan Nelayan
- Gebrakan Keberpihakan Kepada Rakyat Kecil
- Pemutihan Utang Petani dan Nelayan Sejalan dengan Keinginan DPD RI
- Petani dan Nelayan Bisa Fokus untuk Tingkatkan Produktivitas
- Bank Pelat Merah Apresiasi Kebijakan Penghapusan Utang

NUSANTARA

10

- DPD RI Siap Jembatani Investor Masuk ke Daerah
- Dukung Swasembada Pangan, Tamsil Apresiasi Inovasi Padi Trisakti
- Pengalihan Subsidi BBM ke BLT Berdampak Pada Kelas Menengah
- LaNyalla Terima Aduan Warga Dugaan Mafia Tanah di Jatim
- Berbagai Persoalan Pelik Dihadapi Warga Transmigran di Sorong
- Senator Hidayat M Sjah Kunjungi 12 Desa Terisolir
- BKD Diminta Jaga Kejujuran Dalam Seleksi PPPK
- Setop Kriminalisasi Guru!
- Bea Masuk Produk Pangan Harus Diperketat

VARIA SENAT

20

- Daerah Penghasil Pangan dan Energi Mesti Diberdayakan dengan Maksimal

BULD DPD RI Pantau Perda Tata Kelola Pemerintahan Desa

Anggota DPD RI Pantau Persiapan Pilkada 2024

Happy Djarot Terima Audiensi Diaspora DIY

SEKRETARIAT JENDERAL

25

Optimalkan Peran Setjen DPD RI Wujudkan Parlemen Modern

DWP DPD RI Gelar Diskusi Pengelolaan Keuangan

GALERI FOTO

27



GAGASAN

28

Food Estate Merauke: Harapan dan Tantangan Menuju Kemandirian Pangan di Era Prabowo

WISATA

30

Empat Destinasi Menarik di Pulau Batam
Four interesting destinations on Batam Island





Penghapusan Utang UMKM dan Dukungan DPD RI

Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan kebijakan penting untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menghapuskan utang yang membebani pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan nelayan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Kebijakan ini disambut baik oleh DPD RI, yang melihatnya sebagai bentuk perhatian serius terhadap sektor-sektor yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Sebagai informasi, UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 66 juta dan menyumbang 61% dari PDB, serta menyerap hampir seluruh tenaga kerja Indonesia.

DPD RI melihat penghapusan utang ini sebagai angin segar bagi petani dan nelayan yang selama ini terpinggirkan, meskipun memegang peran vital dalam ketahanan pangan dan ekonomi negara. Dengan mengurangi beban finansial yang ada, mereka diharapkan dapat kembali fokus pada peningkatan kualitas produksi, inovasi teknologi, serta kesejahteraan yang lebih baik. Kebijakan ini diharapkan mendorong sektor pertanian dan perikanan untuk berkembang lebih maju, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada proses implementasinya yang tepat sasaran. Selama ini, regulasi yang baik seringkali terkendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini dijalankan dengan transparan dan efisien, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para pelaku UMKM di sektor-sektor tersebut. Dengan implementasi yang tepat, kebijakan ini dapat menjadi langkah signifikan untuk memulihkan sektor UMKM dan meningkatkan daya saing nasional. **(* / Pimred)**

Small Medium Enterprises' Liability Write-Off And DPD RI's Support

President Prabowo Subianto has already issued an essential policy for Small Medium Enterprise (SME) Sector by writing off its liabilities which burden entrepreneurs in agriculture, fishery, farming industry and fishermen through Government Regulation Number 47 Year 2024. The policy is most welcome by DPD RI which is of the view that it is a form of serious attention toward sectors which have all along been Indonesian economic backbone. For information, SMEs in Indonesia amount to 65 million and contribute 61% of the GDP, and absorb almost all labor force in Indonesia.

DPD RI deems the liability write-off as a fresh air to farmers and fishermen who have all this while been marginalized despite their vital role in national food security and economic resilience. Having been eased from the existing financial burden, they are expected to regain their focus on improving production quality, technology innovation, as well as moving toward better prosperity. The policy is expected to boost agricultural and fishery sectors to advance further, so that they can make greater contribution toward the national economy.

Nevertheless, the prosperity of the policy is subject to right-on-target implementation process. All this while, good regulations are oftentimes constrained in their implementation. Therefore, it is important for the government to enforce that the policy is being implemented transparently and efficiently in order that the corresponding benefit is truly enjoyed by SME entrepreneurs of those sectors. Under correct implementation, such policy can turn into significant steps to recovering SME sectors as well as enhancing national competitiveness. **(* / Chief editor)**



SENATOR DUKUNG PENGHAPUSAN UTANG PETANI DAN NELAYAN



GKR Emas. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Emas menyambut positif dan mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto menghapus utang yang membebani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian, perikanan, serta peternakan dan nelayan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024.

Gusti Kanjeng Ratu Emas mengutip catatan Kadin, pada tahun 2023, pelaku usaha UMKM di Indonesia mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM ini mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan, pada Agustus tahun lalu, UMKM juga berkontribusi menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian yang sangat berarti bagi sektor-sektor yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan UMKM dapat kembali bangkit dan berinovasi tanpa terbebani oleh tanggungan finansial yang berkepanjangan.

“Kami mendukung kebijakan pro-rakyat. Ini adalah langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengurangi ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat,” kata senator dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu, Kamis (7/11/2024).

GKR Hemas menyebut petani dan nelayan sebagai pahlawan ekonomi yang sering terpinggirkan dan kurang mendapatkan perhatian, meskipun mereka memegang peran vital dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional dan gizi generasi bangsa. Penghapusan utang ini memberikan angin segar bagi mereka untuk bangkit, meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki teknologi pertanian dan perikanan, serta lebih fokus pada produksi yang berkualitas.

Dia berharap kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik,



tepat sasaran, dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sebab, hal terpenting dari setiap kebijakan pemerintah adalah proses implementasinya. Selama ini, regulasi sering kali bagus, namun lemah dalam implementasi. Karena tidak semua UMKM mendapatkan penghapusan utang, perlu adanya syarat dan kriteria khusus untuk mengantisipasi agar tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selain kriteria dan syarat tertentu, Hemas mengingatkan pemerintah dan otoritas perbankan untuk memastikan penghapusan utang ini dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian dan dilengkapi dengan kebijak-

an yang memastikan pememinjam tetap bertanggung jawab dalam pinjaman di masa depan. “Regulasi perlu diperjelas dan diperketat. Ke depan, proses simpan pinjam untuk UMKM perlu mempertimbangkan banyak aspek, seperti permodalan, manajemen, likuiditas, serta aspek kemandirian dan pertumbuhan yang tidak merugikan salah satu pihak,” ucapnya.

GKR Hemas mengajak semua pihak untuk mendukung kebijakan ini, agar Indonesia dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional pascapandemi dan memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi ketahanan pangan serta perekonomian Indonesia secara keseluruhan. (*)



Gebrakan Keberpihakan Kepada Rakyat Kecil

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil

Linrung mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus tagihan kredit atau utang satu juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan.

Penghapusan utang petani dan nelayan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024, tanggal 5 November 2024, tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kelautan. Nilai utang yang dihapuskan dalam kebijakan ini

maksimal Rp500 juta untuk badan usaha dan Rp300 juta untuk perorangan.

“Ini gebrakan yang sungguh merefleksikan keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil dan pelaku sektor riil. Presiden Prabowo mewujudkan janjinya dengan langsung membuat kebijakan yang menyentuh rakyat bawah. Keresahan dan empati Presiden Prabowo ini yang disampaikan dalam pidato pelantikannya, dan dibuktikan dalam hitungan hari,” kata Tamsil, Rabu (6/11/2024).

Tamsil Linrung menyebut kebijakan Prabowo menghapus utang rakyat sebagai bentuk subsidi dan dukungan agar mereka semakin terpacu dalam meningkatkan produktivitas. Kebijakan ini sekaligus dapat mendorong upaya akselerasi swasembada pangan

yang dicanangkan pemerintah, sehingga program-program prioritas Presiden Prabowo dapat terwujud dengan cepat.

Tamsil menjelaskan bahwa sektor riil merupakan urat nadi ekonomi dan menjadi penyumbang tenaga kerja terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan proteksi, yaitu upaya menyelamatkan sektor riil melalui kebijakan subsidi, insentif, maupun stimulus agar gairah ekonomi arus bawah semakin terpacu.

Kebijakan penghapusan utang ini diharapkan diikuti oleh penyuluhan dan edukasi kepada para petani, nelayan, dan UMKM agar ke depannya bisa mengelola keuangan dengan baik sehingga menghindari munculnya masalah kredit macet. “Biasanya ada pendampingan dari bank sebagai kreditur. Kita dorong agar pendampingan yang dilakukan lebih intensif lagi sehingga skala usaha masyarakat juga bisa terjaga dan meningkat,” kata senator asal Sulawesi Selatan ini.

Saat ini, jumlah pekerja di sektor riil, yang meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, pengolahan, dan perdagangan, mencapai 85,76 juta orang. Jumlah ini setara dengan 61,9% dari total pekerja di Indonesia. (*)



Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pemutihan Utang Petani dan Nelayan Sejalan dengan Keinginan DPD RI

Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Nawardi mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memutihkan utang petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut dapat membantu masyarakat, terutama petani dan nelayan, agar tidak terjebak dalam pinjaman *online* dan rentenir.

Dampak dari utang-utang lama petani, nelayan, dan pelaku UMKM ini membuat mereka sulit mengajukan kredit baru ke bank. Hal ini disebabkan oleh adanya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK, untuk mendukung penga-

wasan dan layanan informasi di sektor keuangan.

“DPD RI sangat mengharagai setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat di daerah. Hal ini tentu sejalan dengan tugas dan fungsi DPD RI sebagai lembaga yang merepresentasikan suara masyarakat daerah,” ujar Senator dari Provinsi Jawa Timur itu, baru-baru ini.

Komite IV DPD RI memandang kebijakan penghapusan utang petani dan nelayan ini sangat positif. Namun, kebijakan ini juga perlu diimbangi dengan perbaikan sistem keuangan dan pengelolaan utang agar petani dan nelayan tidak kembali terjebak dalam utang di masa depan. Penguatan program pendampingan keuangan, pelatihan manajemen usaha, dan akses yang lebih baik ke pasar harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung keberlanjutan ekonomi para petani dan nelayan.

“Selain itu, kami juga berharap adanya sinergi antara kebijakan penghapusan utang dan dukungan kebijakan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Pemerintah tidak hanya

membantu membebaskan petani dan nelayan dari beban keuangan, tetapi juga memastikan mereka memiliki fondasi yang kuat untuk kesejahteraan jangka panjang,” kata Nawardi.

Penghapusan utang bagi petani dan nelayan ini akan memperkuat ekonomi daerah. Sebab, sebagian besar petani dan nelayan berada di daerah-daerah yang bergantung pada sektor ini sebagai pilar ekonomi lokal. “Penghapusan utang dapat memberikan stimulus ekonomi langsung ke daerah-daerah tersebut, meningkatkan daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi setempat,” tambahnya.

Kebijakan ini juga memberikan ruang finansial bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan memenuhi kebutuhan dasar tanpa beban utang yang menghimpit. Petani dan nelayan dapat lebih fokus pada peningkatan produktivitas melalui investasi dalam teknologi, peralatan, dan teknik produksi yang lebih efisien.

Selain itu, dengan penghapusan utang ini, sektor petani dan nelayan menjadi lebih menarik bagi generasi muda, sehingga regenerasi tenaga kerja dapat terjaga. Selama ini, beban utang sering menjadi alasan generasi muda enggan melanjutkan profesi sebagai petani atau nelayan. (*)



Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Petani dan Nelayan Bisa Fokus untuk Tingkatkan Produktivitas

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Evi Apita Maya, mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus utang petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selama ini, banyak petani di daerah pemilihannya yang terjebak utang di perbankan dan koperasi.

“Saat reses untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa, saya menemukan bahwa salah satu masalah utama masyarakat adalah utang untuk modal pertanian. Banyak petani terjebak utang di perbankan dan koperasi. Di sisi lain, banyak juga yang mengalami gagal panen pada musim tanam lalu, sehingga mereka kesulitan menutupi atau mengembalikan pinjaman di bank maupun koperasi,” ungkap Evi Apita, Minggu (3/11/2024).

Akibat dari utang lama tersebut, petani, nelayan, dan pelaku UMKM tidak bisa mengajukan pinjaman baru ke bank karena adanya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung pengawasan dan layanan informasi di sektor keuangan.

Bagi Evi, penghapusan



Anggota DPD RI Evi Apita Maya saat reses di Sumbawa, NTB, Minggu (3/11). (Foto Istimewa)

utang ini adalah kabarembira bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Dengan adanya pemutihan utang, mereka dapat lebih fokus meningkatkan produktivitas melalui investasi dalam teknologi, peralatan, dan teknik produksi yang lebih efisien.

“Saya mendukung pemutihan utang ini. Keluhan petani terkait utang yang diambil dari bank dan lembaga keuangan lainnya, dan kesulitan mereka dalam mengembalikan pinjaman, adalah aspirasi masyarakat yang akan saya sampaikan ke pemerintah pusat. Salah satunya adalah dengan mendukung kebijakan penghapusan utang ini,” ujar Evi, yang juga anggota Komite IV DPD RI.

Diketahui, wacana kebijakan tu-

runan serupa sempat mencuat setelah terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-Undang tersebut memperbolehkan bank-bank BUMN melakukan hapus tagih tanpa dianggap sebagai kerugian negara. (*)



Anggota DPD RI Evi Apita Maya (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Bank Pelat Merah Apresiasi Kebijakan Penghapusan Utang

Pemerintah resmi menghapus utang macet bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kebijakan ini mencakup UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta sektor-sektor lainnya.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyambut baik kebijakan tersebut. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, “Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik.” Ia juga menilai kebijakan ini memberi peluang bagi pelaku UMKM yang sebelumnya masuk daftar hitam untuk kembali mengakses pembiayaan.

Senada dengan BRI, *Corporate Secretary* Bank BTN Ramon Armando menyampaikan dukungannya terhadap aturan tersebut. “BTN sedang mempelajari dan mengkaji PP ini untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan



Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Foto Tangkapan Layar/Instagram@presidenrepublikindonesia-

peraturan yang berlaku,” ujar Ramon. Menurutnya, peraturan ini diharapkan dapat memberi kesempatan kepada UMKM untuk bangkit kembali.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo, mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor UMKM, khususnya bidang pertanian dan kelautan. “Kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM,” katanya. BNI, menurutnya, juga siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan efektif.

Di sisi lain, *Corporate Secretary* Bank Mandiri

Teuku Ali Usman menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk memperkuat perekonomian kerakyatan. “Kebijakan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing UMKM di Indonesia secara jangka panjang,” ujarnya. Ia menjelaskan, kebijakan ini tidak berdampak signifikan terhadap neraca keuangan Bank Mandiri.

Bank Mandiri juga berharap kebijakan ini dapat memberi kesempatan bagi pelaku UMKM, khususnya petani dan nelayan, untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka. (*) (Sumber: Detikcom)

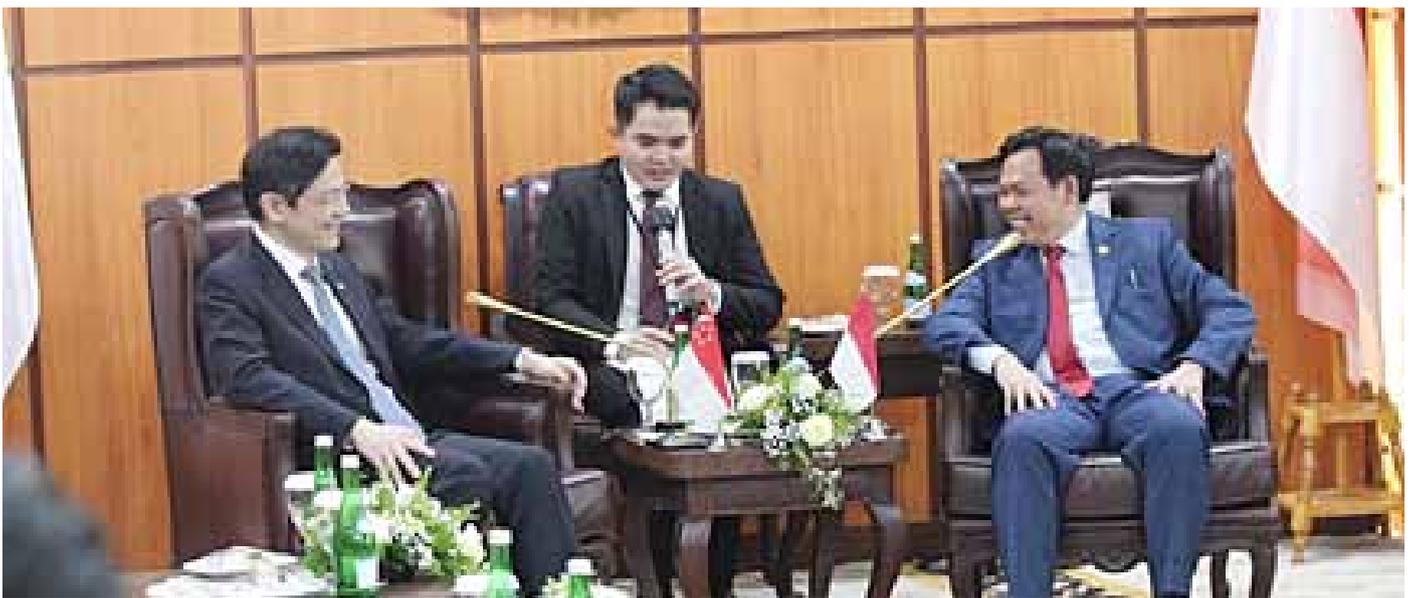
DPD RI Siap Jembatani Investor Masuk ke Daerah

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai isu, khususnya peningkatan investasi dari investor Singapura ke daerah-daerah di Indonesia.

Sultan mengatakan, hubungan bilateral Indonesia dan Singapura sudah memasuki usia 58 tahun, dan kedua negara merupakan mitra strategis di bidang politik, ekonomi, hingga pertahanan dan keamanan kawasan ASEAN. Singapura adalah investor raksasa bagi Indonesia dengan lebih dari USD 15 miliar yang dikucurkan ke Indonesia hanya pada tahun 2023, men-

cakup sekitar 30% dari seluruh investasi asing.

“Singapura memiliki komitmen untuk investasi dengan porsi yang lebih besar di Indonesia. Saya dan Bapak Presiden Prabowo Subianto mempunyai frekuensi yang sama terhadap peningkatan ekonomi dan investasi di Indonesia. DPD RI siap menjembatani para investor dari Singapura masuk ke semua



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (kanan) bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong (kiri). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

daerah di Indonesia,” kata senator dari Bengkulu itu.

Dalam pertemuan itu, Sultan juga menyinggung isu politik global, khususnya di Timur Tengah. Sultan menyampaikan kepada PM Singapura yang memiliki hubungan diplomatik

dengan Israel, “DPD RI menaruh harapan kepada Singapura yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel untuk dapat menyampaikan kepada pemerintah Israel agar menghentikan perang di Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon,” kata Sultan.

Pada kesempatan ini, PM Singapura Lawrence Wong mengatakan setelah bertemu Presiden Prabowo sebelumnya, ia mengharapkan untuk

saling meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, termasuk pertahanan, teknologi digital, *green economy*, dan ketahanan pangan.

“Kita mau sukses bersama-sama antara Indonesia dan Singapura, saling bekerja sama dalam berbagai bidang, tidak hanya sebagai negara tetangga tapi sebagai saudara, dan membangun kawasan ASEAN agar lebih kuat dan bersatu,” ujar PM Wong. (*)

Dukung Swasembada Pangan, Tamsil Apresiasi Inovasi Padi Trisakti

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung, ketika menerima audiensi Serikat Tani Islam Indonesia (STII), menegaskan dukungannya terhadap berbagai inovasi di bidang pertanian yang mampu menopang target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, seperti yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Target yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo merupakan tantangan bagi kita. Swasembada pangan dalam empat sampai lima tahun ke depan tidak dapat dicapai dengan cara-cara biasa. Harus didukung melalui terobosan dan inovasi,” kata Tamsil saat menerima audiensi STII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Karena itu, Tamsil mengapresiasi inovasi produktivitas tanaman padi Trisakti yang dihasilkan oleh Serikat Tani Islam Indonesia. Padi Trisakti dapat dikembangkan lebih luas untuk mengakselerasi kebangkitan sektor pertanian, demi mencapai ketahanan pangan Indonesia. Padi tersebut siap panen setiap 75 hari dan empat kali setahun, seperti diungkapkan Ketua Umum PB STII, Fathurrahman Mahfudz.

Menurut Tamsil, ada empat



Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung (keenam dari kiri) ketika menerima audiensi Serikat Tani Islam Indonesia (STII). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

masalah yang membelenggu pertanian di Indonesia, yaitu keterbatasan lahan, regenerasi petani, modernisasi, dan produktivitas. Isu produktivitas bisa terjadi karena masalah tanah atau jenis tanaman. Maka, temuan jenis padi Trisakti yang mampu menghasilkan gabah hingga belasan ton per hektar merupakan pencapaian impresif yang harus diadopsi oleh pemerintah.

Tamsil berharap inovasi tersebut dapat memperkuat daya tarik sektor pertanian di mata generasi muda. Pertanian harus dilihat sebagai sektor yang terbuka terhadap modernisasi dan inovasi, serta menjanjikan masa depan yang cerah. Dengan demikian, regenerasi petani dapat terwujud, menjadikan sektor pertanian lebih maju dan berkelanjutan.

Tamsil mengakui bahwa meskipun Indonesia dikenal sebagai negeri agraris, banyak permasalahan dalam sektor pertanian menyebabkan ketergantungan pada impor untuk kebutuhan pangan. Hal ini mencerminkan adanya anomali, di mana potensi besar di bidang pertanian tidak sejalan dengan kemandirian pangan yang diharapkan.

“DPD RI mendorong penyelesaian masalah impor pangan dan mendukung target swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Untuk mencapai hal itu, penting adanya sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak. Termasuk mengajak masyarakat berinovasi dan menyampaikan hasil inovasinya. Kami akan memfasilitasi agar mendapat dukungan dari pemerintah,” kata Tamsil. (*)

Pengalihan Subsidi BBM ke BLT Berdampak Pada Kelas Menengah

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku khawatir dengan rencana pemerintah mengubah subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bantuan langsung tunai (BLT), yang dinilai akan memberikan dampak luar biasa terhadap perekonomian nasional. Terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat kelas menengah, yang saat ini sedang mengalami tren penurunan pendapatan.

Terkait wacana pemerintah untuk menghapus atau mengalihkan subsidi BBM ke BLT, Sultan mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan tren penurunan pendapatan kelas menengah serta maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Kelas menengah memiliki kontribusi besar dalam struktur pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami harap pemerintah dapat mengkaji secara menyeluruh dampak penghapusan subsidi BBM ini. Karena yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kelas menengah. Menghapus subsidi BBM akan mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Kami minta pemerintah tidak mengabaikan keberadaan kelas menengah yang selama ini tidak berhak dan tidak tersentuh BLT,” kata



Ilustrasi BBM bersubsidi. (Foto Antara)

Sultan, Senin (4/11/2024).

Mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu justru mengusulkan agar pemerintah menaikkan pajak kendaraan bermotor daripada menghapus subsidi BBM. Pajak kendaraan bermotor perlu dihitung dengan pendekatan yang lebih ketat, dengan memasukkan variabel tingkat emisi karbon yang dihasilkan, selain harga dan bobot kendaraan sebagai basis perhitungan pajak. Sultan menilai, lebih baik pemerintah fokus melakukan terobosan peningkatan rasio pajak, salah satunya dengan menaikkan pajak kendaraan pribadi berdasarkan harga dan tingkat emisi tertentu.

Sultan juga menilai potensi pajak kendaraan bermotor masih sangat besar untuk ditingkatkan oleh pemerintah. Saat ini, lebih dari 40 persen

kendaraan bermotor tidak membayar pajak. Selain itu, Sultan mendorong pemerintah agar mempercepat dan memperluas kebijakan transisi energi untuk kendaraan.

Lebih lanjut, Sultan menyoroti bahwa pembaruan data dan penggunaan teknologi dalam sistem distribusi BBM bersubsidi masih belum presisi. Karena itu, selama ini subsidi dan BLT kerap menemui persoalan atau dianggap salah sasaran akibat belum adanya basis data yang valid dan sistem distribusi yang optimal.

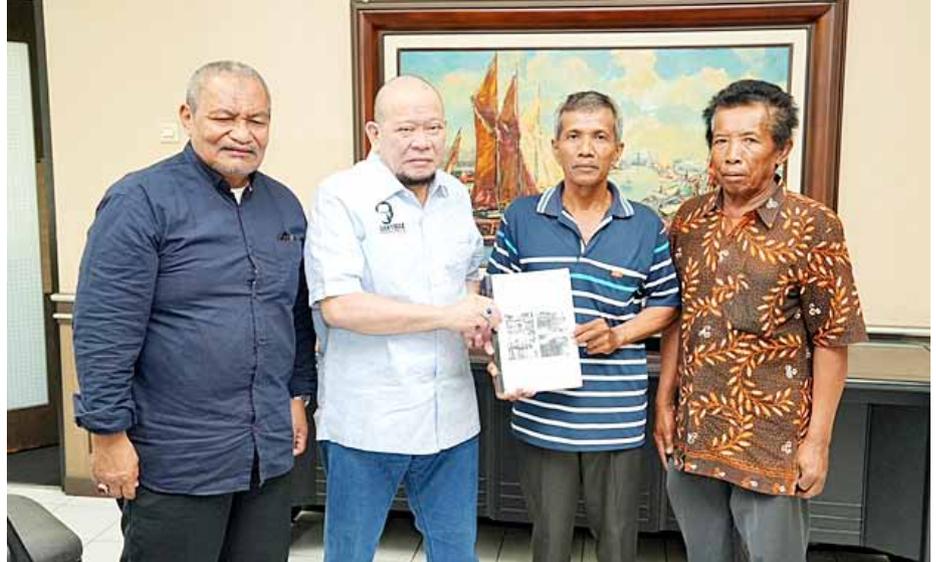
Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi, khususnya subsidi BBM, dari subsidi berbasis produk menjadi subsidi langsung berupa transfer tunai kepada masyarakat dalam bentuk BLT. (*)

LaNyalla Terima Aduan Warga Dugaan Mafia Tanah di Jatim

Sejumlah warga di Kota Surabaya, Jawa Timur, mengadakan kasus dugaan mafia tanah kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Beberapa warga yang merupakan ahli waris tanah tersebut bersengketa dengan pengembang mal dan perumahan, menceritakan kronologi yang mereka alami.

Salah satu pengadu adalah Budi Mulyono, yang mewakili Darmawan, ahli waris dua kavling tanah yang kini tengah bersengketa dengan pengembang perumahan mewah di Surabaya. “Sebagai ahli waris, Pak Darmawan memiliki dua kavling tanah, di mana satu kavling saat ini masih menjadi sengketa dan dalam tahap peninjauan kembali (PK) di pengadilan,” kata Budi kepada LaNyalla di Surabaya, Rabu (30/10/2024).

Budi menjelaskan bahwa secara administrasi, ahli waris memiliki bukti yang lengkap, termasuk dokumen jual beli hingga bukti pembayaran PBB sejak tahun 1991. Urutan tanah juga tercatat dengan baik di kelurahan. Namun, masalah muncul ketika ahli waris mendapat gugatan dari pengembang perumahan yang mengklaim tanah mereka.



Anggota DPD RI Jawa Timur menerima pengaduan dari masyarakat Surabaya yang menjadi korban mafia tanah. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pengembang tersebut hanya berbekal kuitansi sebagai bukti pembelian, namun gugatannya diterima dan dimenangkan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Kasasi di Mahkamah Agung (MA). Karena itu, Budi meminta LaNyalla untuk membantu menyelesaikan kasus yang dihadapi ahli waris tersebut.

Keluhan serupa diungkapkan oleh Kerto P. Sampe, yang juga bersengketa dengan pengembang yang sama. Pada tahun 2005, keluarganya digugat oleh pengembang perumahan tersebut atas tuduhan wanprestasi terkait hak atas tanah mereka.

Menanggapi aduan tersebut, LaNyalla menilai bahwa sengketa tanah seringkali menjadi rumit karena adanya

campur tangan mafia tanah. Sebagai anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, senator asal Jawa Timur itu berjanji akan membawa kasus ini untuk diselesaikan di tingkat nasional.

“Persoalan sengketa tanah dan mafia tanah ini menjadi perhatian pemerintah, termasuk kami di DPD RI. Tentu saja masalah ini tak bisa dibiarkan. Kami akan segera menindaklanjuti di tingkat nasional. Apalagi Kementerian ATR/BPN telah memiliki Satgas Anti Mafia Tanah. Saya akan segera melaporkan kasus ini agar mendapat prioritas penyelesaian. Tentu pihak-pihak terkait juga akan diagendakan untuk dipanggil guna penyelesaian kasus ini,” kata LaNyalla. (*)

Berbagai Persoalan Pelik Dihadapi Warga Transmigran di Sorong



Anggota DPD RI Agustinus R Kambuaya mengunjungi warga transmigran di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. (Foto Istimewa)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Agustinus R. Kambuaya, mengunjungi daerah pemilihannya di Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kunjungan tersebut, Agustinus menyambangi warga transmigran di Kabupaten Sorong untuk bersilaturahmi, berdiskusi, dan menyerap aspirasi mereka.

Pada kesempatan itu, warga transmigran menyampaikan berbagai persoalan, salah satunya terkait kepemilikan tanah. Sejak tahun 1995, sebagian warga transmigran telah menerima sertifikat tanah, namun masih ada yang hingga kini belum memilikinya. Ironisnya, meskipun belum memiliki sertifikat sebagai alas hak, warga tetap membayar pajak atas tanah tersebut.

“Persoalan lahan dan kepemilikan masih menjadi masalah pelik hingga saat

ini. Warga transmigran yang dikirim ke Sorong kini sudah memasuki generasi kedua. Kenyataannya, mereka tidak bisa memaksimalkan lahan untuk memproduksi hasil pertanian guna mendukung swasembada pangan,” ungkap Agustinus Kambuaya, Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, meski memiliki lahan yang luas, warga transmigran tidak mendapatkan dukungan berupa bibit, pupuk, maupun modal usaha. Selain itu, akses pasar untuk memasarkan hasil pertanian mereka dalam jumlah besar guna mendukung ekonomi keluarga dan pendidikan anak-anak juga sangat terbatas.

“Setelah menanam, produk pertanian hanya dijual ke pasar sentral atau pasar rakyat. Namun, sering kali hasil panen tidak laku, membusuk, dan akhirnya dibuang. Jadi, masalahnya bukan hanya

pada gagal panen, tetapi juga minimnya akses pasar yang memadai dan menguntungkan,” ujar Agustinus.

Warga transmigran khawatir jika pemerintah mendatangkan transmigran baru, mereka akan menghadapi nasib serupa. Lahan tidur tetap tidak produktif karena kesulitan akses modal dan pasar. Akibatnya, banyak warga transmigran kembali ke kampung halaman atau beralih profesi ke bidang lain yang lebih menjanjikan.

Agustinus menegaskan bahwa pemerintah perlu memikirkan strategi pemberdayaan penduduk lokal untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan antara warga asli Papua dan warga transmigran. “Ini sangat penting karena kenyataannya mereka menghadapi kesulitan ekonomi, sosial, serta minimnya akses terhadap modal, teknologi, dan pasar,” tutupnya. (*)

Senator Hidayat M Sjah Kunjungi 12 Desa Terisolir

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Maluku Utara Hidayat M. Sjah, melakukan kunjungan kerja ke 12 desa terisolir di Kabupaten Halmahera Utara. Dalam kunjungan tersebut, Hidayat, yang juga merupakan Sultan Ternate, bersilaturahmi dengan masyarakat Suku Madole dan perwakilan dari desa-desa lain di kawasan tersebut.

“Saya akan mendorong agar Desa Madole dijadikan desa adat, sehingga nilai-nilai budaya dan bahasa daerah tetap terjaga. Saya juga berkomitmen untuk memperjuangkan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2024 di DPR RI,” ungkapnya di Ternate, Kamis

(7/11/2024).

Dalam dialognya, masyarakat Suku Madole dan desa-desa lain menyampaikan berbagai aspirasi, di antaranya terkait infrastruktur yang rusak, seperti jalan, jembatan, rumah adat, serta kebutuhan alat musik tradisional. Mereka berharap agar aspirasi ini dapat diperjuangkan di tingkat pusat.

Selain itu, tokoh adat se-



Anggota DPD RI Hidayat M Sjah saat melakukan pertemuan dengan warga Desa Madole. (Foto Antara)

tempat menitipkan usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kao Raya. Menanggapi hal ini, Hidayat menegaskan akan membawa usulan tersebut ke rapat pleno di Komite I DPD RI untuk dibahas lebih lanjut. Sebelumnya, Hidayat juga

pernah mengusulkan Kelurahan Tubo di Maluku Utara sebagai Kampung Adat guna menjaga pelestarian adat istiadat yang hingga kini tetap terjaga. “Kampung adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adat. Di Tubo, adat istiadat Ternate yang dikenal dengan Adat Se Atorang masih kuat terpelihara,” jelasnya.

Sultan Ternate itu turut menyampaikan kepada masyarakat bahwa tugas pokok DPD RI adalah mengajukan usulan, memberikan pertimbangan, dan pendapat terhadap RUU yang diajukan oleh DPR RI. “DPD RI tidak memiliki kewenangan legislasi penuh, tetapi kami berhak memberikan usulan atau masukan terhadap RUU yang berdampak signifikan bagi daerah,” tutup Hidayat. (*)

BKD Diminta Jaga Kejujuran Dalam Seleksi PPPK

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Pdt. Penrad Siagian, menghadiri rapat bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara pada Selasa (5/11/2024). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah Sumatera Utara, termasuk transparansi, prioritas bagi Tenaga Honorer Kategori II (THK2), dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Serentak 2024.

Dalam kesempatan itu, Penrad menekankan pentingnya menjaga integritas dalam setiap tahapan seleksi PPPK. Ia mengingatkan BKD agar memastikan proses rekrutmen bebas dari praktik suap dan pengaruh pihak tertentu. “Saya berharap BKD menjaga kejujuran dalam proses seleksi PPPK dan bersih dari upaya suap-menyuap, sehingga yang terpilih adalah peserta dengan kemampuan dan kualitas terbaik,” ujar Penrad.

Selain itu, Penrad menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib pegawai honorer, khususnya yang tergolong dalam THK2. Ia menyoroti pengabdian panjang mereka, yang dalam banyak kasus mencapai 13 hingga 20 tahun. Menurutnya, pegawai dengan



Anggota DPD RI Pdt. Penrad Siagian (kelima dari kiri) bersama jajaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumatera Utara. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

masa kerja yang lama harus mendapatkan prioritas dalam seleksi PPPK. “THK2 yang sudah lama mengabdikan layak diberikan prioritas, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka,” tegasnya.

Penrad juga berencana menemui Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyampaikan aspirasi terkait THK2. Salah satu usulan yang akan disampaikan adalah agar pegawai THK2 dapat mendaftar PPPK tanpa harus menjalani tes, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi mereka selama ini.

Terkait penggajian PPPK, Penrad mengingatkan agar pengaturannya tidak membebani anggaran daerah. Ia menyarankan BKD dan pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan

keberlanjutan penggajian tanpa mengganggu stabilitas fiskal daerah.

Penrad juga memberikan apresiasi terhadap kinerja BKD Provinsi Sumut dalam manajemen ASN dan non-ASN. Meski demikian, ia mendorong perbaikan lebih lanjut untuk memastikan bahwa seleksi dan pengelolaan pegawai berjalan lebih transparan dan profesional.

Pada kesempatan yang sama, Penrad menyinggung netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024 yang akan datang. Ia meminta BKD untuk memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis. “ASN yang melanggar aturan netralitas dalam Pilkada harus diberikan sanksi tegas. Netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal,” tutupnya. (*)

Setop Kriminalisasi Guru!

Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dailami Firdaus mengungkapkan keprihatinannya dengan maraknya terjadi kasus kriminalisasi terhadap guru, yang semakin hari intensitasnya boleh dikatakan semakin banyak terjadi. Dia menyerukan darurat perlindungan guru dan dengan tegas meminta untuk menyetop kriminalisasi terhadap guru.

Pemberitaan di berbagai *platform* media telah menjadi bola panas dan pembesar bagi orang tua murid dan pihak-pihak lainnya untuk melakukan hal serupa terhadap guru. Tindakan dilakukan guru sebagai bentuk pendidikan, pengajaran dan pembinaan pada siswa justru dianggap se-

bagai tindakan penganiayaan dan penghinaan oleh orang tua siswa. Sehingga menjadi bahan aduan dan tuntutan pidana maupun perdata.

“Perjuangan mereka untuk mencerdaskan dan mengangkat harkat dan martabat anak bangsa melalui pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh guru justru di balas dengan memenjarakan guru, menuntut ganti kerugian pada guru dan tindakan lain yang tidak patut kepada guru. Bukankah ini ibarat air susu di balas air tuba?” tegas

Dailami Firdaus, Selasa (12/11/2024).

Dailami menyebut, sedikitnya ada empat hal yang bisa dilakukan terkait permasalahan kriminalisasi guru ini.

“Melalui langkah-langkah ini, kita dapat menghentikan kriminalisasi guru dan memastikan mereka merasa aman dalam melaksanakan tugas mulia mencerdaskan bangsa,” tutup Dailami Firdaus. (*)



Dailami Firdaus
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Seorang guru sedang melakukan proses belajar mengajar di sekolah. (Foto istimewa)

Untuk mengatasi masalah ini, Dailami mengusulkan empat langkah strategis:

1. Arahan Presiden untuk Langkah Strategis

Presiden diminta menginstruksikan kementerian terkait, seperti Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Mendikdasmen, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mendagri, serta Kapolri, untuk mengambil tindakan nyata dalam melindungi guru. Langkah ini diperlukan untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap profesi guru, yang berperan penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

2. Perlindungan oleh Mendikdasmen

Dailami mendesak Mendikdasmen untuk memanfaatkan Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3798/B.B1/HK.03/2024 tentang Petunjuk Teknis Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Meski telah terjadi perubahan struktur kementerian, keputusan ini masih relevan dan harus dijadikan panduan hingga regulasi baru diterbitkan.

3. Revisi UU Guru dan Dosen

Dalam jangka panjang, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen perlu direvisi untuk memperkuat perlindungan terhadap guru. Komite III DPD RI telah mengusulkan perubahan UU ini sejak 2019, tetapi hingga kini belum dibahas oleh DPR RI. Revisi tersebut harus mencakup perlindungan hukum, profesi, kesehatan, keselamatan kerja, dan hak kekayaan intelektual.

4. Pembentukan Satgas Perlindungan Guru

Pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan organisasi profesi guru didesak untuk segera membentuk dan mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Guru. Satgas ini diharapkan berperan efektif dalam melindungi guru serta mengajak masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan tugasnya. (*)

Bea Masuk Produk Pangan Harus Diperketat

Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, mendesak pemerintah segera merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101 Tahun 2009 tentang Tarif Bea Masuk atas Impor Produk Susu Tertentu serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Nawardi menilai, kebijakan jangka pendek seperti menghentikan impor dari lima pabrik pengolah susu tidak cukup menyelesaikan masalah peternak susu dalam negeri. Hal ini hanya mengatasi masalah sementara tanpa mengubah ketidakseimbangan regulasi impor yang menjadi akar persoalan.

“Revisi regulasi ini sangat

mendesak untuk melindungi peternak susu lokal, yang kini semakin tertekan oleh tingginya impor susu, terutama dari negara-negara mitra dagang seperti Selandia Baru dan Australia,” kata Nawardi pada Rabu (13/11/2024).

Nawardi menambahkan, tarif bea masuk produk susu impor yang hanya sebesar 5%, serta perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang membebaskan bea masuk susu dari beberapa negara, telah merugikan industri susu nasional. Oleh karena itu, ia mendesak agar tarif bea masuk produk susu impor dinaikkan menjadi 20% untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat bagi produk susu lokal.

Selain itu, Nawardi juga menegaskan bahwa kebijakan PPN harus memperhatikan keberpihakan pada susu lokal. Perlakuan yang sama terhadap susu impor dan lokal membuat peternak dalam negeri semakin terpuruk. “Jika regulasi ini tidak segera diubah, industri susu dalam negeri akan

semakin terpuruk,” tegasnya.

Seruan serupa disampaikan oleh Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin. Sultan mendorong pemerintah memberlakukan bea masuk terhadap semua jenis produk pangan impor untuk menjaga produktivitas pangan lokal, termasuk susu. “Kami mendengar keluhan dari peternak yang dirugikan oleh banjirnya susu impor karena tidak dikenakan bea masuk,” ujarnya.

Sultan mengingatkan bahwa tanpa kebijakan protektif, swasembada pangan akan menjadi mimpi. Pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan perdagangan dengan negara-negara mitra dagang untuk melindungi industri pangan dalam negeri, terutama untuk menjaga semangat petani dan peternak lokal. (*)



Ahmad Nawardi
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Daerah Penghasil Pangan dan Energi Mesti Diberdayakan dengan Maksimal

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkomitmen akan memperkuat dan menggerakkan roda pemerintahan untuk mengedepankan semangat persatuan serta keberanian sebagai kunci bagi bangsa dalam menghadapi tantangan ke depan. Tantangan tersebut tentunya untuk mewujudkan mimpi besar swasembada pangan dan energi sebagai sebuah tugas bersama.

“Indonesia tidak boleh lagi tergantung pada pihak luar untuk kebutuhan mendasar rakyatnya. DPD RI akan terus mendorong kebijakan yang mendukung swasembada ini, dan memastikan bahwa daerah-daerah penghasil pangan dan energi kita diberdayakan dengan maksimal,” ucap Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat Sidang Paripurna Ke-7 DPD RI di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (28/10/24).

Sultan menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari sawit hingga sumber energi terbarukan. DPD RI akan memastikan pengelolaan sumber daya dilakukan dengan bijak, berkelanjutan, dan memberi manfaat besar bagi rakyat di daerah. Kemudian kebijakan subsidi yang tepat sasaran akan menjadi hal yang krusial. Untuk itu, DPD RI akan mengupaya-



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama Wakil Ketua GKR Hemas dan Tamsil Linrung saat memimpin Sidang Paripurna Ke-7 DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

kan sepenuhnya bantuan sosial dan subsidi benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan, tanpa penyelewengan.

“Setiap daerah di Indonesia, memiliki keunikan dan potensi ekonominya masing-masing. DPD RI akan mengawal dengan sungguh-sungguh bahwa kebijakan hilirisasi ini memberikan nilai tambah yang nyata bagi daerah-daerah. Sehingga kemakmuran tidak hanya dirasakan di pusat, tetapi menyebar hingga ke pelosok negeri ini,” ujar Sultan.

Tantangan lain yang tak kalah serius dihadapi bangsa ini menurut Sultan, yaitu memberantas korupsi dan kebocoran anggaran yang menggerogoti masa depan bangsa. DPD RI berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang ada di setiap sudut negeri ini. Ka-

rena itu, partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan harus diperhatikan. Harus dipastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan untuk pembangunan daerah akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada penyelewengan. Tidak boleh ada kolusi antara pengusaha nakal dan pejabat yang tidak amanah.

Sultan merasa optimis dengan anggota Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kabinet ini berisikan tokoh-tokoh terbaik bangsa yang berasal dari berbagai latar belakang, dengan satu tujuan bersama yaitu menggerakkan roda pemerintahan untuk kemajuan Indonesia. “Tentunya DPD RI menyambut baik dengan tangan terbuka dan siap bersinergi dengan pemerintahan saat ini,” kata Sultan. (*)

BULD DPD RI Pantau Perda Tata Kelola Pemerintahan Desa

Anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam masa kegiatan reses, akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda), khususnya terkait dengan tata kelola pemerintahan desa.

Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow menjelaskan bahwa pemantauan terkait tata kelola pemerintahan desa menjadi salah satu prioritas penting pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025. Menurutnya, terdapat beberapa aspek krusial yang membutuhkan perhatian dalam tata kelola pemerintahan desa.

Pertama, terkait aspek regulasi dan kebijakan. Aspek ini mencakup pengelolaan pemerintahan desa dalam menghadapi tantangan dalam pemahaman regulasi dan kebijakan, terutama terkait tata kelola, keuangan, dan perencanaan pembangunan desa yang belum optimal. “Selain itu, ditemukan praktik kebijakan yang dilakukan di luar kewenangan desa serta disiplin pelaporan yang perlu ditingkatkan,” kata Stefanus melaporkan dalam Sidang Paripurna Ke-7 DPD RI, Rabu (28/10/2024).

Kedua, hubungan pusat



Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow didampingi Wakil Ketua BULD Marthin Billa, Abdul Hamid dan Agira Nurfianti, menyerahkan laporannya kepada Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

dan daerah. Saat ini masih terdapat ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah pusat, khususnya dalam sistem pemerintahan dan pertanggungjawaban melalui kementerian terkait. BULD melihat perlunya peningkatan kapasitas SDM serta pengembangan sistem informasi guna mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif.

Ketiga, aspek partisipasi masyarakat. Stefanus mengatakan bahwa pengawasan dan kontribusi masyarakat dalam tata kelola dan pembangunan desa perlu diperkuat. Masyarakat desa diharapkan dapat lebih aktif

terlibat dalam proses pengelolaan dan pembangunan di tingkat desa.

“Langkah evaluasi dan pemantauan yang dilakukan DPD RI ini diharapkan mampu mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan memperkuat fondasi pemerintahan desa di seluruh Indonesia,” kata senator dari Sulawesi Utara itu.

Dalam Sidang Paripurna DPD RI tersebut, Stefanus menyerahkan laporannya ke Pimpinan DPD RI, didampingi Wakil Ketua BULD Marthin Billa (Kalimantan Utara), Abdul Hamid (Riau), dan Agira Nurfianti (Jawa Barat). (*)

Anggota DPD RI Pantau Persiapan Pilkada 2024

Pada 27 November 2024, Indonesia akan menggelar hajatan pesta demokrasi yang cukup besar, yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), pilkada digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sangat berkepentingan dengan kelancaran pelaksanaan pilkada tersebut. Oleh karena itu, pada masa reses yang tengah berlangsung, anggota DPD RI, khususnya anggota Komite I, melakukan pemantauan persiapan pilkada di daerah pemilihannya masing-masing.

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang, misalnya, mengunjungi kantor Bawaslu Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Selasa (5/11/2024). Teras Narang disambut oleh Ketua Bawaslu Kalteng, Satriadi, serta anggota Bawaslu Siti Wahidah dan Benny Setia. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Bawaslu Kalteng, Palangka Raya. “Penting persiapan yang matang dari pelaksanaan pilkada ini. Pemilihan kepala daerah ini harus menjadi pesta demokrasi yang menghasilkan kepemimpinan berkualitas bagi setiap daerah,” ujar Teras Narang.

Teras Narang juga mene-



Anggota DPD RI Agustin Teras Narang saat mengunjungi Bawaslu Kalimantan Tengah. (Foto Prokatleng)



Anggota DPD RI Leni Jhon Latief saat mengunjungi Kantor Kesbangpol Kabupaten Kepahiang. (Foto Bengkuluekspress)

kankan pentingnya dukungan penuh dan pengawalan ketat terhadap penyelenggara dan pengawas pilkada. “Pilkada ini mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas dan benar-benar mewakili aspirasi rakyat,” tambahnya. Kunjungan Teras Narang di Kalteng bertujuan untuk memastikan kesiapan daerah dalam menyukseskan pilkada serentak.

Anggota Komite I DPD RI Leni Jhon Latief juga melaku-

kukan pemantauan terkait persiapan pilkada di Bengkulu. Pada Rabu (7/11/2024), Leni mengunjungi kantor Kesbangpol dan Polres Kabupaten Kepahiang untuk berdialog mengenai kesiapan daerah dalam pengamanan pilkada. Leni menilai kondisi keamanan menjelang pilkada di Kabupaten Kepahiang sudah kondusif. “Kondisi di lapangan sangat kondusif dan sesuai dengan yang diharapkan sehingga

tahapan pilkada dapat berjalan dengan baik,” kata Leni.

Leni juga mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama pelaksanaan pilkada. “Kita mengajak semua pihak untuk sama-sama menjaga Kamtibmas, agar pelaksanaan pilkada berjalan dengan lancar,” tambahnya. Kabupaten Kepahiang dinilai siap menggelar pilkada yang akan digelar pada akhir bulan ini.

Sementara itu, anggota DPD RI asal Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti, melakukan kunjungan kerja ke Polda Jawa Barat dan Kodam III Siliwangi pada Senin (11/11/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung. Dalam pertemuan dengan Irwasda Kombes Pol Rinto Prastowo dan Karoops Kombes Pol Budi Warsono, Aanya membahas langkah-langkah strategis pengamanan, termasuk pemetaan wilayah rawan konflik.

Aanya mengapresiasi kesiapan Polda Jawa Barat dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama pilkada. “Pentingnya langkah preventif agar proses pemilihan berjalan lancar dan kondusif,” tegas Aanya. Dalam pertemuan dengan Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, Aanya menegaskan bahwa tanggung jawab utama keamanan ada di tangan Polri, sedangkan



Anggota Komite I DPD RI Aanya Rina Casmayanti bersama Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Anggota DPD RI Dwi Ajeng Sekar Respaty saat melakukan pertemuan dengan Komisi KPU Provinsi Kepulauan Riau. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

TNI berkoordinasi dan membantu Polri dalam menjaga keamanan serta pembinaan masyarakat agar taat hukum.

Anggota DPD RI lainnya, Dwi Ajeng Sekar Respaty, melakukan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Kantor Sekretariat DPD RI Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (12/11/2024). Pertemuan itu dihadiri langsung Ketua KPU Provinsi Kepri Indrawan Susilo Prabowoadi dan jajarannya. Sekar menekankan pentingnya kesiapan dana dan pemanfaatan yang tepat untuk

memastikan setiap tahapan pilkada berjalan sesuai aturan.

Sekar juga mengingatkan tentang pentingnya sinergi dan kerja sama antara KPU, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi pilkada serentak. “Dengan sinergi dan kerja sama, kita optimis pilkada di Kepulauan Riau akan terselenggara dengan sukses dan berkualitas,” kata Sekar. Selain itu, Sekar juga menyoroti tantangan aksesibilitas geografis di wilayah Kepulauan Riau yang memerlukan perhatian ekstra dalam persiapan pilkada. (*)

Happy Djarot Terima Audiensi Diaspora DIY

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Jakarta, Happy Djarot, menerima audiensi Forum Komunikasi Diaspora Paguyuban Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta-DKJ, di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi DKI Jakarta, Senin (11/11/2024).

Hadir dalam pertemuan itu anggota Forum Komunikasi Diaspora Paguyuban Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dari Paguyuban PAWARTA (Paguyuban Warga Yogyakarta), IKG (Ikatan Keluarga Gunungkidul), Paguyuban KPB Bersatu (Kerukunan Perantau Bantul Bersatu), Paguyuban WBM

(Warga Bantul Manunggal), Paguyuban DJOKER (Djogja Kreatif), Paguyuban PRAJA JOGJA, dan Paguyuban SMS (Sleman Manunggal Sembada).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Forum Komunikasi Diaspora Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Suryo Purnomo menyampa-



Anggota DPD RI Happy Djarot menerima audiensi Forum Komunikasi Diaspora Paguyuban Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

kan bahwa ke depan perlu dibangun sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara Diaspora DIY dengan DPD RI dalam berbagai kegiatan, terutama dalam program

pengembangan UMKM dan seni budaya.

Harapannya, kegiatan audiensi ini dapat menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, informasi, dan penjelasan terkait berbagai persoalan di Jakarta. Mengingat pentingnya peran DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah, diharapkan berbagai permasalahan masyarakat di

Jakarta dapat terselesaikan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Happy Djarot mengucapkan terima kasih atas pertemuan tersebut. “Terima kasih atas kehadirannya. Saya senang hari ini kita dapat memperluas persaudaraan, dan selanjutnya akan menindaklanjutinya ke Rapat Komite II DPD RI dan kepada pihak-pihak terkait,” jelasnya. (*)

Optimalkan Peran Setjen DPD RI Wujudkan Parlemen Modern

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, dalam rangka Optimalisasi Peran Setjen DPD RI Sebagai *support system* untuk Mewujudkan DPD RI yang Kuat, Aspiratif, dan Inklusif, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Selain sebagai ajang silaturahmi Pimpinan DPD RI dengan seluruh pegawai di lingkungan Setjen DPD RI baik di kantor pusat maupun di ibu kota provinsi, Pimpinan DPD RI mengharapkan peningkatan layanan administrasi dan keahlian kepada pimpinan, anggota DPD RI, serta pelayanan kepada publik karena pada periode ini ingin mewujudkan parlemen yang modern, kuat, efektif, kolaboratif, dan inklusif.

“Itulah sebabnya kami mengumpulkan para pegawai semua untuk menyamakan ritme, bersatu, dan bekerja sama, serta berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan maksimal bagi lembaga kita ini. Saya ingin menekankan pentingnya koordinasi



Pimpinan DPD RI saat memberikan pengarahan seluruh jajaran pegawai Setjen DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

antarunit di Sekretariat Jenderal, kolaborasi, dan sinergi dengan kementerian/lembaga lainnya, karena hal tersebut akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program DPD RI,” kata Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin bersama Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.

Sultan menambahkan, dalam era digital sekarang ini harus senantiasa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan industri digital yang terus berkembang. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pekerjaan, termasuk dalam hal pengelolaan dan optimalisasi membangun *brand-*

ing lembaga dengan citra positif melalui media sosial, sehingga pengetahuan masyarakat terhadap DPD RI meningkat.

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas mengapresiasi dukungan setiap unit dari Setjen DPD RI selama lima periode dia berada di lembaga DPD RI dan mengharapkan semua pihak tetap bekerja semaksimal mungkin dan profesional. Kantor DPD RI di ibu kota provinsi diharapkan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk meningkatkan kinerja kelembagaan DPD RI.

“Baru kali ini kita mengumpulkan seluruh pegawai. Kita mau memba-



ngun kedekatan untuk saling mendukung, menyamakan irama kerja, meningkatkan kinerja dan kerja-kerja lembaga, dan terutama kesejahteraan bagi pegawai. Saya yakin kita semua bisa,” ucap Hemas.

Sedangkan Yorrys Raweyai meminta seluruh jajaran kesekjenan untuk mengubah *mindset* berpikir dalam pengelolaan manajemen agar lebih baik. “Untuk mewujudkan organisasi modern, perlu percepatan dan adaptasi. Secara kolektif kita sepakat, membangun kelembagaan yang baik agar bisa mendukung seluruh kegiatan-kegiatan DPD RI. Agar berhasil, kita perlu menyamakan visi, misi, dan bekerja *all out*,” tukas Yorrys.

Tamsil Linrung juga mengapresiasi kinerja kesekjenan dalam mendukung tugas konstitusional. “Saya senada dengan Pimpinan DPD RI lainnya, berharap ke depan dalam mewujudkan parlemen modern. Dengan kolaborasi dan sinergi, kita akan melesatkan lembaga DPD RI ini bersama-sama,” papar Tamsil.

Plh. Sekjen DPD RI Lalu Niqman Zahir melaporkan bahwa dalam rangka optimalisasi peran Setjen DPD RI sebagai *support system* untuk mewujudkan DPD RI yang kuat, aspiratif, dan inklusif, ada sebanyak 1.285 orang yang terdiri dari PNS, PPPK, dan PPNPN, baik di kantor pusat maupun di kantor daerah. (*)

DWP DPD RI Gelar Diskusi Pengelolaan Keuangan



Plh. Ketua DWP Setjen DPD RI Jasnety Lalu Niqman Zahir saat memberikan sambutan. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar pertemuan triwulan berupa diskusi dengan tema ‘Meningkatkan Kemampuan Anggota DWP Setjen DPD RI Dalam Mengelola Keuangan Pribadi dan Keluarga’, di Lobi Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Plh. Ketua DWP Setjen DPD RI Jasnety Lalu Niqman Zahir dalam sambutannya menyatakan, dalam menghadapi tantangan keuangan yang makin kompleks, perlu adanya kemampuan mengelola keuangan untuk mendukung ketahanan keluarga.

Menurutnya, kemampuan ini penting untuk memastikan kestabilan keuangan keluarga dan mencapai tujuan finan-

sial. “Hal ini penting. Dengan kemampuan mengelola dan perencanaan keuangan yang baik, kita akan mampu menghadapi tantangan finansial, menciptakan suasana rumah tangga harmonis, meningkatkan kesejahteraan, dan ketahanan ekonomi keluarga,” ucap Jasnety.

Jasnety berharap, dengan menghadirkan pakar keuangan Argha Jonatan Karokaro dan Sub Branch Manager BNI Dian Ediati dalam diskusi tersebut, mampu memberikan *transfer knowledge* dan wawasan baru bagi semua anggota DWP Setjen DPD RI dalam pengelolaan keuangan yang baik. “Semoga acara ini mampu memberikan manfaat dan dapat kita implementasikan pada kehidupan sehari-hari,” pungkasnya. (*)

Ketua DPD RI Sutan B Najamudin didampingi Kepala Biro Protokol Humas dan Media Mahyu Darma menerima kedatangan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, di Lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



OSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI

300 JURNALIS 21-24-2024
Gedung Transmedia
TBS Cikarang



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat menghadiri pelantikan Sylviana Murni sebagai Rektor Institut STIAMI, Rabu (30/10/24). Sylviana Murni adalah anggota DPD RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan DKI Jakarta.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Tiga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Aceh, yaitu Azhari Cage, Tgk Ahmada, dan Darwati A. Gani, mengadakan silaturahmi dengan awak media, di Kantor DPD RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Kamis (7/11/2024).
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)





Food Estate Merauke: Harapan dan Tantangan Menuju Kemandirian Pangan di Era Prabowo

Oleh:

Mediana Pongsitanan/Fungsional Ahli Madya Analisis Legislatif

A. Pendahuluan

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia telah usai, yang tersisa adalah kerja seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan 17 (tujuh belas) program prioritas yang dicanangkan oleh Pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Salah satu program prioritas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, adalah “Swasembada Pangan.” Prabowo mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia harus bisa memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Bahkan dikatakan, bahwa dalam empat hingga lima tahun ke depan, Indonesia tidak hanya akan mampu swasembada pangan tetapi juga menjadi lumbung pangan dunia.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Indonesia pada semester pertama tahun 2024 berjumlah sekitar 282 juta jiwa. Namun, peringkat ketahanan pangan Indonesia berdasarkan *Global Food Security Index* (GFSI), berada pada posisi ke-69 dari 113 negara, dengan skor 59,2. Peringkat ini tergolong rendah dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura (skor 77,4), Malaysia (70,1), Thailand (64,5), Vietnam (61,1), dan Filipina (60,1). Data

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada impor beras dengan volume impor sebesar 567,22 ribu ton pada Maret 2024 senilai US\$371,60 juta atau sekitar Rp 6,02 triliun. Angka ini mencerminkan peningkatan 29,29% dibandingkan Februari 2024 serta lonjakan 921,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Ketergantungan pada impor beras menunjukkan urgensi bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Di tengah meningkatnya tantangan global terhadap ketahanan pangan, proyek “*Food Estate*” yang berada di Merauke, Papua Selatan, diproyeksikan menjadi pusat produksi pangan nasional. Proyek ini menjadi simbol harapan bagi Indonesia dalam mencapai kemandirian pangan dan memenuhi kebutuhan domestik.

Food Estate Merauke, yang memiliki luas 70 kali Jakarta, dirancang untuk menanam komoditas unggulan seperti padi dan tebu. Targetnya, Indonesia dapat mencapai swasembada beras pada tahun 2027 dan memenuhi kebutuhan gula serta bahan baku bioetanol pada tahun 2028. Proyek ini pertama kali dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2020, sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional untuk me-

ningkatkan ketahanan pangan. Pendanaan *Food Estate* Merauke bersumber dari APBN dengan melibatkan Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, dan mitra swasta. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp124,4 triliun untuk ketahanan pangan, termasuk *Food Estate* Merauke.

B. Konsep *Food Estate*

Food Estate adalah kawasan yang dirancang khusus untuk produksi pangan skala besar dengan memanfaatkan teknologi modern dan praktik pertanian berkelanjutan. Konsep ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan nasional dengan menanam berbagai komoditas seperti padi, jagung, sayuran, dan umbi-umbian.

Inisiatif pengembangan *Food Estate* di Indonesia muncul sebagai respons terhadap tantangan ketahanan pangan. Proyek *Food Estate* Merauke mencakup area seluas 2,29 juta hektare dan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Merauke dipilih karena potensi lahan dan sumber daya alamnya yang melimpah. Dengan teknologi pertanian modern dan investasi Pemerintah, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan produksi

pangan sekaligus memberdayakan masyarakat lokal.

C. Harapan dari *Food Estate Merauke*

Merauke dipilih karena memiliki lahan yang luas dan potensi sumber daya alam yang melimpah, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional secara signifikan dan mengurangi ketergantungan pada impor sehingga memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal dan nasional.

Peningkatan produksi pangan ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal secara signifikan, dengan berbagai peluang kerja di bidang pertanian maupun sektor pendukung lainnya, termasuk UKM. Proyek ini menerapkan praktik pertanian berkelanjutan dengan memberikan pelatihan keterampilan bidang pertanian dan pendampingan kepada petani lokal mulai dari hulu hingga pemasaran, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

D. Tantangan yang Dihadapi

Implementasi program *Food Estate* menghadapi tantangan besar, di antaranya ketidaksesuaian lahan dan potensi dampak lingkungan yang dikhawatirkan berujung pada kegagalan. Pengalaman kegagalan proyek serupa contohnya di Bulungan Kalimantan dan Gunung Mas. Berdasarkan penelitian, tidak semua lahan di Papua ideal untuk pertanian intensif. Beberapa studi menggarisbawahi bahwa lahan gambut yang menjadi target utama

proyek, bukanlah tanah yang ideal untuk pertanian karena sifatnya yang asam dan sulit diolah tanpa teknik khusus.

Proyek yang sama pernah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010, yaitu *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE), seluas 1,2 juta hektare. Namun, proyek ini dinyatakan gagal karena lahan gambut di Merauke tidak cocok untuk pertanian padi. Selain itu, konflik tenaga kerja akibat kurangnya manajemen SDM juga menghambat proyek ini.

Selain kondisi tanah, *Food Estate* di Merauke juga menghadapi resistensi dari masyarakat adat Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei yang tinggal di sekitar lokasi proyek, yakni terdapat sekitar 50 ribu penduduk asli yang tinggal di 40 kampung yang berpotensi terdampak mega proyek ini. Kegiatan ini juga dapat mendorong deforestasi yang mengancam hubungan sakral masyarakat Papua dengan alam yang merupakan tempat perhelatan beragam ritual mereka.

Di samping itu, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang wajib ada untuk proyek-proyek besar seperti ini belum diselesaikan. Padahal, peraturan terkait lingkungan hidup mengharuskan proyek besar yang berdampak signifikan terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL sebelum pengerjaan proyek, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan

Lingkungan Hidup.

Para pengamat mengingatkan bahwa proyek besar seperti *Food Estate* ini membutuhkan perencanaan jangka panjang dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal. Implementasi yang tergesa-gesa tanpa kajian teknis mendalam bisa mengarah pada kegagalan. Studi terkait irigasi, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan keberlanjutan proyek penting untuk menjamin kesuksesan jangka panjang.

E. Kesimpulan

Proyek *Food Estate* Merauke menawarkan peluang besar dalam meningkatkan kemandirian pangan Indonesia. Namun, pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif sangat penting agar proyek ini dapat berkontribusi pada ketahanan pangan yang diinginkan.

Pembangunan *Food Estate* Merauke harus melibatkan kajian mendalam dan pendekatan multidisiplin, yang juga mempertimbangkan aspek ekologis serta melibatkan masyarakat Papua. Pemerintah diharapkan mampu memetik pelajaran dari kegagalan proyek-proyek *Food Estate* sebelumnya dan mengoptimalkan potensi lahan yang ada.

Alih-alih hanya mengandalakan lahan baru, intensifikasi lahan pertanian *eksisting* dapat menjadi solusi efektif. Pendampingan bagi petani dalam bentuk mekanisme distribusi pupuk yang baik dan akses ke alat produksi akan lebih berdaya guna dalam mewujudkan kemandirian pangan. (*)



Empat Destinasi Menarik di Pulau Batam

Four Attractive Destinations in Batam Island

1 Jembatan Barelang / Barelang Bridge

Ikon Pulau Batam yang menghubungkan beberapa pulau kecil, Jembatan Barelang terdiri dari enam jembatan yang membentang dari Batam hingga Pulau Galang. Selain menjadi penghubung vital, jembatan ini menawarkan pemandangan laut yang memukau, terutama saat matahari terbenam. Jembatan Barelang menjadi tempat favorit untuk ber-swafoto dan menikmati suasana laut yang tenang.



(Foto Kompas Regional)

As the icon of Batam Island which connects several isles, Barelang bridge comprises six bridges stretching from Batam to Galang Island. Besides being a vital infrastructure, the bridges offer scenic beach view, especially during sunset. Barelang bridge has turned into favorite spots for making selfies and enjoying tranquil beaches.

2 Pantai Nongsa / Nongsa Beach

Terletak di pesisir timur Batam, Pantai Nongsa adalah destinasi populer untuk wisatawan yang mencari ketenangan sambil menikmati hamparan pasir putih dan air laut yang jernih. Dengan panorama Singapura yang terlihat dari kejauhan, pantai ini menawarkan berbagai aktivitas seperti snorkeling, jet ski, hingga menikmati kuliner seafood yang segar.



(Foto HarianKepri.com)

Located in the east coast of Batam, Nongsa beach is a popular destination for tourists who are seeking tranquility while enjoying stretch of white sand and clear sea. With the panorama of Singapore clearly seen on the horizon, the beach offers various marine activities such as snorkeling and jet skiing and variety of fresh seafood to enjoy.

3 **Kampung Vietnam / Vietnam Village**

Kawasan ini adalah peninggalan sejarah yang dulunya merupakan tempat pengungsian warga Vietnam pada tahun 1979 hingga 1996. Kini, Kampung Vietnam menjadi lokasi wisata sejarah yang menarik, lengkap dengan sisa-sisa bangunan dan monumen yang mengenang kisah para pengungsi. Wisatawan dapat belajar tentang sejarah yang mendalam sambil mengeksplorasi area bekas pengungsian ini.



(Foto eranusanews.com)

The area is an historical site which was formerly used to be a refugee camp for Vietnamese since 1979 to 1996. Today, Vietnam Village has become an attractive historical tourism site with its ruin of building remains and monument which commemorates the story of the refugees. Tourists can have a deep history learning while exploring the ex-refugee camp.

4 **Nagoya Hill Shopping Mall**

Sebagai pusat perbelanjaan terbesar di Batam, Nagoya Hill Shopping Mall menawarkan berbagai barang elektronik, pakaian, dan kuliner lokal maupun internasional. Lokasinya yang strategis di pusat kota membuatnya ramai dikunjungi, baik oleh wisatawan lokal maupun asing, terutama untuk mencari oleh-oleh khas Batam dan menikmati beragam sajian kuliner.



(Foto Youtube)

As the largest shopping center in Batam, Nagoya Hill Shopping Mall offers variety of electronic devices, clothes, and both local and international culinary pleasures. By the virtue of its strategic location in the center of the city do visitors, both domestic and foreign, crowd the mall, particularly those that are looking for typical Batam gifts and snacks while enjoying variety of food dishes.



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Selamat Memperingati Hari

**PERSATUAN GURU
REPUBLIK INDONESIA
(PGRI)**



25 November 2024



MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI



LANDING DPD RI

